

# **ANALISIS KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM PARLEMEN DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN *STRONG BICAMERALISM***

Fauzul Hadi Aria Langga<sup>1</sup>, Muhammad Zaki Mubarrak<sup>2</sup>

## **INTISARI**

Lahirnya DPD seperti lembaga kurang imun, karena ketentuan peraturan mendiskreditkan keberadaannya. Bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan kedudukan DPD yang limitatif secara konstitusional tidak memiliki cukup wewenang dalam menjalankan fungsi legislasi yang efektif. Pembentukan DPD yang diharapkan dapat menyeimbangkan parlemen dan mewujudkan *bicameral system*, namun hal tersebut tidak tercapai, terlebih *over power* dari DPR yang tidak mampu diseimbangkan oleh DPD.

Tujuan penelitian ini untuk memahami kedudukan dan sifat DPD beserta mengidentifikasi upaya yang bisa membawanya kepada *strong bicameralism*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder, melalui pendekatan normatif konseptual, peraturan perundang-undangan, analitis, perbandingan serta historis, kemudian disajikan secara preskriptif.

Secara historis DPD dibentuk sebagai upaya menguatkan integrasi bangsa dan menjembatani kepentingan daerah ke tingkat nasional. DPD diposisikan sebagai lembaga negara lapis pertama, yang mana kedudukannya setingkat dengan Presiden dan DPR. Namun, dewasa ini fungsi dari DPD sendiri masih belum memberikan dampak yang signifikan, terutama untuk memajukan daerah. Hal tersebut imbas dari kewenangan DPD yang dikebiri sebagai lembaga legislatif melalui aturan yang berlaku. Diperlukannya upaya untuk menguatkan fungsi DPD dan membawa parlemen menuju *strong bicameralism*, dan upaya tersebut ditempuh melalui politik hukum.

Ada banyak alasan mengapa DPD sebagai lembaga perwakilan saat ini tidak efektif dalam melakukan tugasnya. Diantaranya adalah, adanya kesalahpahaman perihal penerapan konsep *bicameral*. Kedua, keterbatasan wewenangan yang dimiliki DPD. Ketiga, DPD diciptakan untuk pencegahan hegemoni lembaga eksekutif. Akan tetapi, dikarenakan DPR memiliki kekuasaan yang besar di parlemen, perimbangan kekuasaan menjadi tidak efektif oleh keduanya.

**Kata Kunci:** *DPD, Legislatif, Parlemen Indonesia, Strong Bicameralism*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

<sup>2</sup> Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

**ANALYSIS OF THE POSITION OF THE REGIONAL REPRESENTATIVE  
COUNCIL IN THE INDONESIAN PARLIAMENTARY SYSTEM AS AN  
EFFORT TO ACHIEVE STRONG BICAMERALISM**

Fauzul Hadi Aria Langga<sup>1</sup>, Muhammad Zaki Mubarrak<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*The establishment of the Regional Representative Council (DPD) appears to be like an institution with weak immunity, as the regulatory provisions undermine its existence. This is not without reason; it is because the constitutionally limited position of the DPD does not grant it sufficient authority to effectively carry out legislative functions. The formation of the DPD was intended to balance the parliament and realize a bicameral system, but this has not been achieved, especially due to the overpowering influence of the House of Representatives (DPR) that the DPD cannot counterbalance.*

*The purpose of this study is to understand the position and nature of DPD and identify efforts that can lead it to strong bicameralism. The research method used is normative juridical with secondary data, through normative conceptual approach, legislation, analytical, comparative and historical, then presented prescriptively.*

*Historically, DPD was formed as an effort to strengthen national integration and bridge regional interests to the national level. DPD is positioned as a first-tier state institution, which is at the same level as the President and DPR. However, today the function of DPD itself still has not had a significant impact, especially to advance the region. This is the impact of DPD's authority which is castrated as a legislative body through the applicable rules. Efforts are needed to strengthen the function of DPD and bring parliament towards strong bicameralism, and these efforts are pursued through legal politics.*

*There are many reasons why DPD as a representative institution is currently ineffective in performing its duties. Among them are, there is a misunderstanding regarding the application of the bicameral concept. Second, the limited authority of DPD. Third, DPD was created to prevent the hegemony of the executive. However, because DPR has great power in parliament, the balance of power becomes ineffective by both.*

**Keywords:** DPD, Indonesian Parliament, Legislative, Strong Bicameralism

---

<sup>1</sup> Undergraduate Law Program Student at Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

<sup>2</sup> Undergraduate Law Program Lecturer at Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

